

## MENGANTISIPASI 'LAWAN DISKURSIF' ISLAM-INDONESIA Bingkai Baru Kelompok Radikal Menggerogoti Pancasila dan NKRI

**Siti Qomala Khayati**

STAI Nahdlatul Ulama' (NU) Temanggung Jawa Tengah

hayatiqomala@gmail.com

**Abstract:** *This article will explore how radical Muslim in Indonesia renewed and reframed their approaches to backlash government ideological discourse, how radical Muslim built new rapprochement to the populist Moslem lives, through social media campaign and propaganda, and also how the ways to solve it in order to Indonesian-Islamic identity still adjusted as common models in daily life, using contested hegemony discourse which was conducted by Antonio Gramsci. In sum, this article promotes what writer calls as educating Islamic moderate official-knowledge as citizenship values, through whole aspects of Muslim lives. The official-knowledge which offers: how to defend the radicalism discourse, how to differ the axiomatic indoctrination and human inquiring of Islamic teaching, and how to rebuild progressive moderate-Muslim as stance which never changing.*

**Keyword;** *Islam Indonesia, Kelompok Radikal, Pancsil dan NKRI*

### PENDAHULUAN

Penulis bersepakat, bahwa sekarang ini kita sudah masuk pada fase baru dari semua lini kehidupan. Era dimana tidak ada kata mudah untuk mendefinisikan fenomena yang terjadi. Seakan, fenomena apapun memiliki dimensi multi-faces; baik fitur, karakter, dan cara pandang pembacanaanya. Di masa awal, pilihan rasional seseorang dibatasi pada apakah itu benar secara normatif atau salah secara fenomenologis. Hari ini, normatifitas kebenaran dirubah, kerangka kesadaran seseorang pun dikonstruksi sesuai keinginan yang mereka inginkan. Sederhananya, dulu radikalisme adalah musuh pemerintah. Pemerintah berhak untuk melakukan apapun bagi pelaku teror, sebab mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Namun, belakangan ini, sikap tegas pemerintah dianggap sebagai wujud anti-agama, anti-Islam, anti-ketentuan yang ditulis secara normatif di dalam hukum Islam, dan alasan rasional lain yang dipakai oleh kelompok radikal, untuk menghilangkan kuasa legitimatif, yang dimiliki pemerintah terhadap kelompok radikal tersebut.

Oleh karena itu, makalah singkat ini, akan membahas bagaimana posisi pemerintah, strategi kelompok radikal, dan apa yang semestinya dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi 'pola terselubung' kelompok radikal yang ada di Indonesia. Secara sistematis, makalah ini akan dibagi menjadi tiga bagian penting; *pertama*, fenomena baru dan pertarungan ideologis kelompok radikal dan upaya pemerintah menanggulangi gerakan tersebut. Dalam konteks ini, ada karya yang menggunakan analisis *framing* media, yang dilakukan oleh Masdar Hilmy dan Zafirdaus



Adnan. Meski sebelumnya, penulis juga akan membahas bagaimana anatomi gerakan yang dibingkai secara normatif terkait gerakan radikal di Indonesia. *Kedua*, cara kelompok radikal bersembunyi di balik Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui media baru, dan sedikit demi sedikit menghilangkan pengaruh ideologi Pancasila di kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, pembacaan baru kelompok radikal menggunakan perangkat baca teori hegemoni Antonio Gramsci. Melalui pembacaan ini, penulis berharap pemerintah mau dan mampu melawan paradigma bentukan kelompok radikal, melalui mengembalikan elan vital identitas keislaman Indonesia.

## **NEW FACES OF RADICALISM IN INDONESIA; BEYOND ISLAMISM AND GOVERNMENT IDEOLOGY**

Menyemai ulang radikalisme Islam di Indonesia pasca reformasi, tentu, tidak akan semudah melakukan analisa di era orde baru.<sup>1</sup> Setelah pemerintahan Soeharto ini, pendekatan perlawanan kelompok radikal tidak lagi perang dan kekerasan dalam makna nyata, melainkan sebaliknya, mereka memainkan peran dalam kehidupan masyarakat; membangun ekonomi masyarakat, menyuarkan keadilan, serta berkontestasi di dalam politik praktis dengan 'menitipkan' kepentingan terhadap kontestan yang didukungnya: melalui persyaratan ilusi negara Islam, daerah bersyari'ah, dan tagline lain yang kontra ideologis dengan nilai Pancasila. Secara teoritik, fenomena dibaca oleh Oliver Roy sebagai neo-fundamentalisme.<sup>2</sup> Khoiril Faizin, mengutip pandangan Abdul A'la dalam pidato guru besarnya, mengatakan ada beberapa komponen kekerasan yang acapkali ditampilkan oleh kelompok Islamis-fundamentalis di Indonesia, yaitu; kekerasan doktrinal, kekerasan tradisi dan budaya, dan membuat kebenaran sepihak (*truth claim determination*) yang dijunjung tinggi membuatnya tidak mampu memahami kebenaran lain yang berbeda.<sup>3</sup> Merlyna Lim membuat konklusi tujuan dan bentuk aksi yang dilakukan oleh kelompok radikal Islam sebagaimana tabel berikut:<sup>4</sup>

**Tabel 1.1**  
**Model Organisasi Gerakan Radikal di Indonesia**

<b>Nama Organisasi Islam</b>	<b>Bentuk Gerakan</b>	<b>Isu yang diangkat</b>
Hizbut Tahrir Indonesia	Seminar, demonstrasi damai, sosialisasi dan kaderisasi, dll	Pendirian Khilafah Islamiyah
Front Pembela Islam	Sweeping terhadap tempat-tempat maksiat, penyerbuan terhadap aliran sesat, dan aksi solidaritas pada kekerasan global kepada masyarakat Islam	Penegakan Syariah Islam tanpa harus mendirikan negara Islam
Laskar Jihad	Aksi-aksi simpatik dan kekerasan terhadap kelompok-	Counter movement terhadap kristenisasi yang dilakukan oleh

<sup>1</sup> Martin Van Bruinessen, "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Soeharto Indonesia" dalam *South-East Asia Research*, Vol 10 No. 2 Tahun 2002, (Singapore: LSAS, 2002), 117-123

<sup>2</sup> Oliver Roy, *the Failure of Political Islam* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1994), 2-4.

<sup>3</sup> Khoiril Faizin, "Fundamentalisme dan Gerakan Radikal Islam" dalam *Jurnal Edu-Islamika* Vol 5 No 2 Tahun 2013, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 354

<sup>4</sup> Merlyna Lim, "Radical Islamism in Indonesia and Its Middle Eastern Connection," dalam *Meria Journal*, Volume 15, Issue 2 June Tahun 2011, (tt, tt.), 34

<b>Nama Organisasi Islam</b>	<b>Bentuk Gerakan</b>	<b>Isu yang diangkat</b>
	kelompok Islam yang diperlakukan tidak baik, mengambil bagian dalam ruang konflik keagamaan lokal, seperti di Maluku, Ambon, dan tempat lainnya, serta menjadi bagian dari aksi terorisme di Indonesia.	kelompok Yahudi dan Barat
Majelis Mujahidin Indonesia	Terorisme dan tindakan kekerasan	Khilafah Islamiyah dan Pemberlakuan Shariah Islam secara holistik.
Jemaah Islamiyah	Terorisme dan tindakan kekerasan yang lebih ditujukan sebagai anti-Barat dan globalisme.	Khilafah Islamiyah dan Pemberlakuan Shariah Islam secara holistik.
Hamas Indonesia	Tidak anarkhis dan sekedar melakukan gerakan simpatik terhadap umat muslim di Palistina.	Tidak harus merubah Indonesia sebagai negara Islam, melainkan mengupayakan kemerdekaan melalui diplomasi kenegaraan yang dilakukan di Indonesia.

Betapapun, kategoriisasi yang dibuat oleh M. Lim di atas, tidak bisa merepresentasikan semua entitas kelompok radikal yang ada di Indonesia kontemporer. Kelompok-kelompok radikal itu sudah bermetamorfosa menjadi banyak model; apakah dalam bentuk organisasi, pondok pesantren, atau lain sebagainya. Ulasan-ulasan terkait bentuk baru itu, tidak begitu penting dalam konteks riset ini. Yang paling penting ialah, bagaimana sebenarnya mereka melawan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yang sah, agar stabilitas dan kerukunan umat beragama di Indonesia bisa terjamin, dan tidak diganggu oleh keberadaan segelintir orang/kelompok yang selalu berupaya memaksakan kehendak yang diyakininya.

Kontestasi tersebut direkam oleh Masdar Hilmy, lalu mengatakan bahwa dikala pemerintah mengencarkan politik deradikalisasi melalui lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Indonesia, dikala itu pula kelompok radikal melakukan apa yang disebutnya sebagai *Backlash of radical Islamist to de-radicalization project in Indonesia* (Balas Dendam Kelompok Radikal terhadap Proyek Deradikalisasi di Indonesia).<sup>5</sup> Dalam pandangan Masdar Hilmy, ada dua bentuk gerakan balas dendam yang dipakai oleh kelompok radikal dalam proyek deradikalisasi. *Pertama* melakukan kontestasi wacana melalui penerbitan buku, tulisan di media masa, hingga penjelasan-penjelasan apologetic yang ditampilkan di dalam website mereka sendiri. *Kedua*, perlawanan berbasis pada gerakan, apakah itu demonstrasi atau melalui gerakan anarkhistis dalam tingkat lokal. Dia menyimpulkan pembacaannya sebagaimana berikut:

*“The resistance of Islamists can take two forms; peaceful and violent. In so far as the resistance is concerned, the peaceful method will give benefit to socio-political dynamics of the country. Criticisms can even make democracy better and healthier.*

<sup>5</sup> Masdar Hilmy, “The Politics Of Retaliation: The Backlash of Radical Islamists to Deradicalization Project in Indonesia,” dalam *jurnal al Jamiah*, Vol 51 No 2 Tahun 2013, (Jogjakarta: UIN Suka, 2013) 130



*But this can be maintained as long as the State does not adopt inappropriate measures or policies with regard to overcoming the ideology of radical Islamism or terrorism. Violent resistance, however, can be counterproductive in the life of society and the reputation of Indonesia at the international level. This is so because such a resistance can result in multiplier effects that drive the politics of retaliation from the radical Islamists and can be even more intense and complicated to deal with. Furthermore, it must be underlined that the state repression to Islamists can swing the pendulum of moderate Muslims sympathy to their side, in which the death execution of terrorists can generate more terrorists. In addition, the adoption of the security approach does not guarantee the termination of radical Islamist ideology.”<sup>6</sup>*

Di pihak berbeda, pada tahun 2015, Zifirdaus Adnan juga melakukan riset serupa. Dia memaparkan bagaimana kelompok radikal memainkan isu-isu ideologis sebagai bentuk perlawanan kepada program yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam artikel dengan judul “*Ideological Conflict between Indonesian Government and The Indonesian Moslems Radicals*”. Dia membingkai tulisan ini dimulai dari rasionalisasi tindakan terror yang mereka lakukan di Indonesia, perbincangan ideologis yang tidak pernah usai di Indonesia, serta kampanye yang dilakukan oleh kelompok radikal.

*“...ideological debate between the Indonesian Government and the radicals, This debate is a continuation of the debate older than the republic itself. There are two reasons. First, there are many amongst the majority Muslims who feel comfortable with being fully Islamic as expected by the religion, while the Indonesian state is not based on Islam, but the Pancasila (the five principles), while the radical ideologists offer a clear and straight forward call for an Islamic State or a state which implement Islamic law (the Shariah), believed to be the only true path to go to heaven... The second reason for making it difficult for the government is that it is undeniable that the Indonesian Government receives financial support from the USA and its Allies in its fight against terrorism in Indonesia. The radical can tweak this fact by developing an argument that the Indonesian Government is fighting Indonesian Muslims for Western powers who fight Islam. In this case, it has acted unjustly against Muslim citizens of Indonesia.”<sup>7</sup>*

Bagi penulis, postulasi pertama bahwa ada keinginan umat Islam Indonesia menjalankan *syariah* (hukum Islam) itu memang benar adanya. Namun, jika ditelisik lebih mendalam, keberadaan hukum Islam yang diinginkan tidak sama persis dengan apa yang dikampanyekan oleh kelompok radikal. Lebih-lebih bagi umat Islam yang memiliki kematangan dalam mehami nilai keagamaan. Bahwa, Zafirdatus Adnan mengatakan keberadaan umat Islam yang acapkali kalah jika diajak berdebat oleh kelompok radikal tidak lebih karena disebabkan kedangkalan pemahaman dia terhadap Islam sendiri. Pada postulasi kedua, yang menganggap bahwa Indonesia tidak memiliki independensi dalam

---

<sup>6</sup> Ibid, 140

<sup>7</sup> Zifirdaus Adnan, “Ideological Conflict between the Indonesian Government and the Indonesian Muslim Radical” dalam *Australian Folklore: a Yearly Journal of Folklore Studies*; February 2017, (Australia; Australian Folklore, 2017), 26



kebijakan politik nasional, tentu sudah lumrah di era global. Amerika dan sekutunya pun tidak bisa terlepas dari kungkungan dunia global di bilik sistem yang mereka ciptakan sendiri. Bagi penulis, alasan bahwa Amerika menjadi alat radikalisme Islam di Indonesia, perlu ditinjau ulang. Sebab, kondisi Indonesia tidak sama persis dengan pertentangan ideologi di era Soeharto dan bisa jadi di era Soekarno.

## **NEW RAPPROCHEMENTS OF RADICAL MUSLIMS; BEYOND ISLAMIC POPULISM-CULTURE AND POLITICS**

Berbeda jauh dengan pola konfliktual yang dilakukan untuk melawan program-program ideologisasi masyarakat oleh pemerintah. Kelompok radikal lebih menggunakan cara hepokrit dalam kehidupan sosial. Cara hepokrit ini penulis maksudkan karena kelompok radikal 'seakan-akan' mendukung apa yang menjadi common sense masyarakat secara sosiologis. Namun, di bawah ketidaksadaran masyarakat awam, mereka menyisipkan ideologi-Islamisme radikal menggunakan indoktrinasi dan haluan bacaan yang dikirimkan secara massif. Pada era pengkajian terhadap produksi paham radikal di Indonesia, dimulai dari beberapa riset terkait majalah, koran, dan selebaran yang sengaja diproduksi oleh kelompok radikal. Penelitian Syamsul Rizal mengidentifikasi beberapa majalah/media cetak yang memiliki afiliasi terhadap kelompok radikal. Misalnya; *Sabili, Ummi, Annida, Tarbawi, dan Saksi*<sup>8</sup>. Di pihak berbeda, Arie Styaningrum Pamungkas pun melakukan riset serupa terhadap beberapa media-media radikal yang ada di Indonesia yang disebarkan oleh para kelompok radikal. Perbedaan dengan Rizal, Pamungkas lebih spesifik membicarakan terkait dampak "media dakwah Ummi" dalam proses konstruksi pemahaman Islamisme dan radikalisme di Indonesia.<sup>9</sup>

Dikala masyarakat mulai mengenal sumber informasi baru; dari tradisi cetak ke virtual dan online. Para peneliti pun, beralih dari paradigma makro ke mikro. Para peneliti tidak bisa melakukan generalisasi terhadap seperti apa komposisi radikalisme, terkecuali mereka menggalinya dari sisi kebijakan pemerintah berdasarkan aturan yang ada. Penjelasan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menyebutkan sudah ada 814.594 situs berkonten seruan radikalisme yang diblockir oleh pemerintah,<sup>10</sup> pasca Undang-Undang ITE tahun 2008 disahkan. Pemerintah pun tidak segan-segan untuk mempublikasikan kepada masyarakat agar lebih mewas diri dalam membaca situs-situs yang bernuansa radikal di Indonesia.<sup>11</sup> Tapi, apakah yang dilakukan pemerintah dengan kebijakan tersebut, menyunat semangat kelompok radikal untuk

<sup>8</sup> Syamsul Rizal, "Media and Islamism in Post New Order Indonesia; The Case of sabili", dalam *Jurnal Studia Islamika* Vol 12 No 3, Tahun 2005, (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 431

<sup>9</sup> Arie Setyaningrum Pamungkas, "The Dakwah Media in Post Soeharto Indonesia; From Politics Identity to popular culture; The Case of Ummi, (Phd Thesis -Universitas Berlin 2015), 234

<sup>10</sup> Lihat Liputan Resmi Kominfo "Kominfo sudah blokir 814.594 Situs Radikal" dalam [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5083/Kominfo+Sudah+Blokir+814.594+Situs+Radikal+0/sorotan\\_med /diakses 03 Maret 2018](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5083/Kominfo+Sudah+Blokir+814.594+Situs+Radikal+0/sorotan_med /diakses 03 Maret 2018)

<sup>11</sup> Lihat Liputan Resmi Kominfo "BNPT Minta Kominfo Blokir 22 Situs Radikal" dalam [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+22+Situs+Radikal+0/berita\\_satker/ diakses 03 Maret 2018](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+22+Situs+Radikal+0/berita_satker/ diakses 03 Maret 2018)



melakukan kampanye Islamisme berbau radikal di Indonesia. Tampaknya tidak, bahkan mereka dengan sangat cerdas menyembunyikan pertentangan ideologis mereka dengan menyerukan hal yang berbeda dari kenyataan hakiki di internal mereka.

Mereka seakan mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bidang yang lain menolak 'musuh yang sempat mengganggu ketentraman Republik Indonesia'. Tampil dalam laman website-website kelompok radikal ini beragam macam seruan, misalnya; mereka ingin membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): dari liberalism,<sup>12</sup> komunisme,<sup>13</sup> dan imprealisme asing.<sup>14</sup> Bahkan dalam situasi tertentu, pemerintah malah mendukung keberadaan kelompok radikal ini. Misalnya, dalam acara ulang tahun FPI yang ke 19. Anies Baswedan memberikan ucapan selamat dan berharap FPI bisa menjaga keutuhan NKRI dan Kebhinnekaan yang ada di Indonesia.<sup>15</sup> Liputan hidayatullah.com pun memberi judul 'Teguhkan komitmen menjaga NKRI, FPI Gelar Milad ke 19 dan Peringatan HUT RI'.<sup>16</sup> Liputan merdeka.com pun sama, tajuk yang digunakan adalah FPI akan menjaga NKRI dari kelompok pemecah belah.<sup>17</sup> Pun demikian halnya di laman resmi FPI, mereka membuat judul yang lebih menarik perhatian, mereka menyebut bahwa FPI merayakan milad sekaligus berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI.

Pola yang sama sejatinya juga dilakukan oleh para kelompok radikal lainnya, jika melihat apa yang tampil di dalam liputan dunia maya. Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan kaki tangan gerakan transnasional, Ikhwanul Muslimin, dan sebagiannya berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Berikut ini adalah beberapa pemberitaan terkait dengan PKS yang mendukung NKRI; republika.com "PKS Sulut Keutuhan NKRI Harga Mati"<sup>18</sup>. Pada laman resmi partai, "Legislator PKS; NKRI Harga Mati"<sup>19</sup> "PKS

<sup>12</sup>Lihat Liputan terkait dukungan terhadap FPI oleh Kopasus dalam <http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/09/fpi-dengan-dukungan-penuh-kopassus-dan.html> / diakses 03 Maret 2018

<sup>13</sup> Lihat Liputan Berita Resmi FPI terkait "penyataan sikapnya terhadap NKRI" dalam <http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/08/pernyataan-sikap-dpp-fpi-terhadap.html> diakses 03 Maret 2018

<sup>14</sup> Lihat Liputan Berita Resmi FPI "ada Israil dalam kasus tolikara" dalam laman <http://www.mozaikharokahfpi.com/2015/07/ada-israel-di-tolikara.html> diakses 03 Maret 2018

<sup>15</sup> Lihat liputan Berita antaranwes.com "Anies minta FPI Jaga Kebhinnekaan" dalam <https://www.antaranews.com/berita/647554/anies-minta-fpi-jaga-nkri-dan-kebhinekaan> diakses 03 Maret 2018

<sup>16</sup> Lihat liputan berita hidayatullah.com "Teguhkan Komitmen Jaga NKRI, FPI Gelar Milad ke 19 dan Peringatan HUT RI" dalam <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/08/19/121780/teguhkan-komitmen-jaga-nkri-fpi-gelar-milad-ke-19-dan-peringatan-hut-ri.html> diakses 03 Maret 2018

<sup>17</sup>Lihat liputan merdeka.com "FPI: Kami akan jadi garda terdepan jaga NKRI dari Kelompok pemecah belah" dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/fpi-kami-akan-jadi-garda-terdepan-jaga-nkri-dari-kelompok-pemecah-belah-bangsa.html> diakses 03 Maret 2018

<sup>18</sup>Lihat liputan republika.co.id "PKS Sumut: Keutuhan NKRI Harga Mati" dalam <http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/trend/17/05/03/en/islam-in-archipelago/13/11/21/nasional/daerah/13/10/30/mvh5rm-pks-sulut-keutuhan-nkri-harga-mati> diakses 03 Maret 2018

tunjukkan rasa nasionalisme dan NKRI harga mati”<sup>20</sup>. Demikian halnya dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang hari ini sedang diambang pembubaran oleh pemerintah. Dalam berbagai kesempatan ketua HTI selalu menegaskan bahwa kegiatan HTI tidak bertentangan dengan Pancasila dan NKRI,<sup>21</sup> HTI turut andil dalam meneguhkan NKRI dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat,<sup>22</sup> dan HTI hanya memberikan gagasan untuk didiskusikan untuk mencari format terbaik buat NKRI.<sup>23</sup>

Beda di laman resmi, media-media nasional acapkali memang men-*frame* FPI dan beberapa kelompok tegaknya syariah Islam tanpa merubah NKRI mejadi negara Islam, sebagai kelompok yang anti-NKRI. Hal ini disebabkan, apa yang diungkapkan dan dilaksanakan dalam bentuk tindakan tidak berlaku sama. Contoh dalam beberapa kasus FPI melakukan kegiatan-kegiatan yang ‘melanggar’ ketaatan sebagai warga negara terhadap konstitusi yang ada; menghina Pancasila,<sup>24</sup> mencoret bendera merah putih,<sup>25</sup> menolak pembangunan rumah ibadah bagi agama lain,<sup>26</sup> atau penolakan terhadap kelompok yang tidak sepaham dengan mereka melalui cara-cara yang anarkhis. Maka dari itu, potret dan slogan yang dikampanyekan serta disahkan oleh para aktor politik terhadap keberadaan FPI ingin menjaga NKRI membutuhkan penafsiran ulang. Hal ini tampak seperti *lips service* para tokoh FPI agar tidak menjadi lawan utama pemerintah.

## **THE WAY OUT: GRAMSCIAN PERSPECTIVE TO WIN THE CONFLICTUAL DISCOURSE**

Bagi penulis, terdapat empat konsep penting dalam dalam membicarakan pemikiran Antonio Gramsci. *Pertama*, *culture* (budaya). *Kedua*, Hegemoni. *Ketiga*,

---

<sup>19</sup> Lihat Liputan pks.id “Legislator PKS: NKRI Harga Mati” dalam <http://pks.id/content/legislator-pks-nkri-harga-mati> diakses 03 Maret 2018

<sup>20</sup> Lihat Liputan pkskabsmg.id “Kader PKS Tunjukkan Sikap Nasionalisme yang tinggi: NKRI Harga Mati” dalam <http://www.pkskabsmg.id/2017/10/09/kader-pks-tunjukkan-sikap-nasionalisme-yang-tinggi-nkri-harga-mati/> diakses 03 Maret 2018

<sup>21</sup> Lihat liputan tempo.com “Disebut usung konsep khilafah di Indonesia ini pengakuan HTI” dalam <https://nasional.tempo.co/read/873786/disebut-usung-konsep-khilafah-di-indonesia-ini-pengakuan-hti> diakses 03 Maret 2018

<sup>22</sup> Lihat liputan sindonews.com “Ismail Yusanto: Kegiatan HTI tak bertentangan dengan Pancasila” dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1203734/13/ismail-yusanto-kegiatan-hti-tak-bertentangan-dengan-pancasila-1494310247> diakses 03 Maret 2018

<sup>23</sup> Lihat Liputan tribunnwes.com “HTI Bantah tudingan tidak punya kontribusi bagi negara” dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/09/hti-bantah-tudingan-tidak-punya-kontribusi-bagi-negara> diakses 03 Maret 2018

<sup>24</sup> Lihat liputan hukumonline.com “dinilai menghina Pancasila Ketua FPI dilaporkan ke Bareskrim” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt581324d499b3f/dinilai-menghina-pancasila-ketua-fpi-dilaporkan-ke-bareskrim> /diakses 03 Maret 2018

<sup>25</sup> Lihat liputan liputan6.com “Polisi: pembawa bendera dicoret jadi tersangka dan simpatisan FPI” dalam <http://news.liputan6.com/read/2833684/polisi-pembawa-bendera-dicoret-tersangka-dan-simpatisan-fpi> diakses 03 Maret 2018

<sup>26</sup> Lihat liputan beritasatu.com “ini alasan massa FPI tolak Pembangunan gereja santa clara” dalam <http://www.beritasatu.com/megapolitan/421380-ini-alasan-massa-tolak-pembangunan-gereja-santa-clara.html> /diakses 03 Maret 2018





intelektualisme. *Keempat*, krisis. Pada posisi budaya, Gramsci membicarakan terkait bagaimana *the ruling group* memainkan peranannya, atau bisa jadi kehilangan power yang dimiliki. Pada posisi kultural ini pula, istilah *war of position* dan *war of maneuver* didefinisikan oleh Gramsci. Dalam konteks ini, menurut Gramsci, sebuah kelompok besar yang memiliki peranan kuat dalam membentuk dan membangun sistem nilai budaya sebuah negara, bisa dikalahkan oleh sikap dan manuver yang dilakukan oleh kelompok-kelompok militan. Dia mencontohkan bagaimana dogma hegemonik yang dilakukan oleh para perancang kekuatan kapitalisme Global, bisa dikalahkan oleh para kelompok komunis yang ada di Rusia. Bagi Gramsci, sebuah percaturan dan pencarian posisi strategis menjadi sangat penting untuk membentuk supra-struktur kebudayaan yang ada di negara tertentu.<sup>27</sup>

*Kedua*, hegemoni. Secara teoritik Gramsci mendefinisikan hegemoni, sebagaimana dikutip oleh Steve Jones sebagaimana berikut: *Seeing hegemony as a dynamic process militates against the view that students of culture can understand the meaning of a text in isolation. In this sense, asking you to analyse a single participatory programme was mildly disingenuous, since no one representation can capture the nexus of power at any one moment – it is indeed, for Gramsci, precisely not something that one can pin down since it is always 'in the process of becoming'*.<sup>28</sup> Artinya, Gramsci memaknai kata Hegemoni bukan bertitik tumpu pada dominasi dan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kelompok atau kelas sosial tertentu. Namun, kata hegemoni bermakna *on going process* yang dinamis. Hegemoni, menurut Gramsci memiliki banyak faktor dan variable yang bisa dianalisa, tidak selalu didominasi dari aspek politik, ekonomi, dan kebudayaan semata. *Ketiga* adalah intelektualisme. Bagi Gramsci intelektualisme adalah perangkat penting dalam melakukan hegemoni atau memenangkan percaturan ideologis atau kebudayaan. Baginya, intelektualisme terbagi menjadi dua; mereka yang memiliki fungsi tradisional dan intelektual organik.<sup>29</sup>

Terakhir dari proses pendefinisian teori Gramsci adalah krisis. Bagi Gramsci keberadaan krisis juga faktor penting untuk melakukan hegemoni. Dia mengatakan bahwa pada sebuah negara, pasti memiliki komposisi ekspektasi yang berbeda-beda, meskipun secara sistem dan ideologinya sama dengan yang lain. Dikala ekspektasi yang diwakilkan kepada seseorang tertentu tidak bisa tercapai dengan baik, maka yang akan terjadi adalah '*crisis of authority*' atau disebut juga *crisis of hegemony*, atau '*general crisis of the State*'.<sup>30</sup> Arti sederhananya ialah negara kehilangan kekuasaannya untuk melakukan

---

<sup>27</sup> Antonio Gramsci, *Selection From The Prison Notebook*, (New York: International Pullisher, 2000), 87

<sup>28</sup> Steve Jones, *Antonio Gramsci*, (Madison Eve, New York: Routledge, 2006), 99.

<sup>29</sup> Kelompok intelektual tradisional yang diungkapkan Gramsci bermakna bahwa sosok intelektual yang memiliki pemahaman keilmiah, namun tidak memiliki positioning dalam melakukan perubahan terhadap masyarakat, serta dia bekerja sendiri untuk membangun keilmuan yang dimilikinya. Berbeda dengan kelompok organik yang memang berkumpul pada posisi tertentu agar berdasarkan kepentingan, profesi, dan alasan lainnya, dalam hal melakukan perubahan di masyarakat. Lihat Peter Mayo, *Gramsci and Educational Thought* (London: Wiley Blackwell, 2010), 23.

<sup>30</sup> *Ibid*, 192



control terhadap warga dan masyarakatnya. Negara dikalahkan oleh mereka yang memainkan *manuver* dan mencari *positioning* untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Mereka seakan mengganti peranan negara untuk bisa menyelesaikan persoalan-persolan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar mereka. Mereka, dalam satu sisi, bisa memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, kendati dalam jangka waktu yang sangat pendek.

Berdasarkan pada kerangka baca ini, tabel berikut ini bisa menggambarkan bagaimana kerangka hegemonik yang dilakukan oleh kelompok radikal untuk memenangkan kontestasi kekuasaan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh negara.

**Tabel 1.2**

**Content Analysis Teori Antonio Gramsci dan Frame Baru Gerakan Radikal di Indonesia**

<b>Komponen Teori Gramsci</b>	<b>Theoretical Evidence</b>
<i>Cultural Positioning and Political Maneuver</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penampilan identitas Islami yang differensiatif dengan kebudayaan Indonesia.</li> <li>- Membentuk simbolisasi-simblosasi destruktif terhadap kelompok mainstram dan dominan, semisal: ke tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, dan organisasi pendukung ideology Indonesia.</li> <li>- Berkongsi atau berelaborasi dengan partai politik oposisi pemerintah.</li> <li>- Memainkan peranan politik atau elit politik baik di era kontestasi ataupun disaat sudah menjabat sebagai seorang pemimpin di pemerintahan.</li> </ul>
<i>Hegemonic Treatment</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyengaja melakukan kontestasi di ruang publik, baik maya ataupun nyata, sesuai dengan sistem kebudayaan yang mereka anut sebagai nilai.</li> <li>- Berkolaborasi dengan otoritas keagamaan-konservatif di Indonesia yang juga memiliki sejarah panjang dalam membangun Islam-Indonesia, misalnya: MUI, Gerakan Hidaytullah, dan beberapa ormas yang menyarakan Islam di era awal kemerdekaan Indonesia.</li> <li>- Mendidik dan membangun lembaga pendidikan yang eksklusif untuk menyiapkan generasi yang akan melawan 'kekuatan' dominan di dalam ideology negara Pancasila dan pilar lainnya.</li> <li>- Menyelipkan pengetahuan di dalam komponen-komponen pembelajaran agama Islam, di lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman keagamaan minim.</li> </ul>
<i>Intellectual Organic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seakan memang dipilah, kelompok intelektual Islam radikal bermain di jalur yang berbeda: mereka membungkusnya dengan model-model pengajian yang diselenggarakan di daerah urban, dimana NU dan Muhammadiyah tidak banyak memiliki basis.</li> <li>- Di lingkungan Kampus mereka memiliki dua gerakan kepemudaan yang berdiskusi dan melakukan perlawanan wacana di lingkungan pendidikan, sebut saja: KAMMI dan HTI.</li> <li>- Adapula kelompok radikal yang seakan melepas ideologis mereka, dan menulis di berbagai media, agar Islam dan sistem nilai formalnya bisa diterima secara langsung oleh para pembacanya.</li> <li>- Adanya kelompok ketiga yang melakukan kapitalisasi dan</li> </ul>



Komponen Teori Gramsci	<i>Theoretical Evidence</i>
	pembungkusan ulang secara politis, sehingga tidak terkesan sedang melawan pemerintah, melainkan benar-benar melakukan perjuangan terhadap umat Islam secara luas.
<i>Crisis of Authority Adjustment</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suka tidak suka, dalam konteks ini, pemerintah memang sedikit abai untuk melakukan <i>counter adjustment</i> agar kelompok ini tidak bisa leluasa mengkampanyekan ideology mereka,</li> <li>- Pemerintah juga memiliki kelemahan dari pelbagai sisi, apakah itu sosiologi stapun sisi ekonomi. Sehingga, propaganda bahwa Indonesia masuk pada era krisis itu sangat rasional untuk dikampanyekan oleh kelompok-kelompok radikal ini.</li> </ul>

Terlepas dari tehnik hegemonic yang dilakukan oleh kelompok radikal, maka ke depan para pendukung Islam-Indonesia juga harus mencari pola yang sama untuk menyadarkan ulang akan bahaya kelompok ini. Dalam arti yang sederhana, kelompok Islam Moderat juga harus membuat strategi dan memberinakan diri untuk berkontestasi secara terbuka; apakah itu dalam dimensi kultural, intelektualisme, institusionalisasi ide-ide keislaman sebagai pendekatan hegemonic kepada para generasi muda, serta membangun otoritas baru – penyeimbangan daripada yang dilakukan oleh pemerintah – agar Islam tidak dijadikan sebagai alat propaganda dan hegemoni melawan kekuasaan yang sah.

Dalam konteks ini, semua orang harus bersepakat dan harus selalu mencermati apa yang dilakukan Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, dan ormas Islam lain yang mendukung Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai bentuk perlawanan kepada kelompok-kelompok radikal, yang pada satu sisi, mengatakan menerima Pancasila tapi tidak menginginkan konstitusinya menggunakan UUD 1945. Menyebut menerima Pancasila dan NKRI, tapi tidak mengakui dan menghargai pluralitas kebudayaan dan keyakinan yang ada di Indonesia. Menerima pluralitas agama, tapi tidak toleran terhadap perbedaan keyakinan di dalam internal agama. Menerima pluralitas di internal umat beragama, antar umat beragama, mengakui semua ideology negara, namun mereka berdemo dan menolak apabila ada kelompok minoritas sedang memperjuangkan hak-haknya yang diakui oleh perundangan-perundangan yang ada di Indonesia.

Pada konteks ini pula, keberpihakan para stakeholder dan tokoh agama harus seragam, dalam nalar substantif intelektualitasnya. Sama seperti yang mereka kembangkan kepada para anggotanya. Sekilas dalam pemahaman penulis, mereka selalu dan konsisten meletakkan kuasa agama di atas kuasa negara. Kuasa agama diinterpretasikan sebagai *ulama'* di atas *umara'*. Dengan demikian, maka kebijakan negara harus mengikuti apa yang diinginkan oleh apa yang mereka sebut sebagai *ulama'*. Sedangkan kelompok islam Indonesia, selalu menempatkan posisi agama dan negara dalam tipikal integrative. Hanya saja, sekali lagi penulis katakan, sikap para *ulama'* Islam-Indonesia masih suka mengkaburkan sikap ini dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Mereka konsisten dalam pemahaman dan perbuatan, tapi pada sisi keberpihakan politik, perilaku kelompok intelektual dan *ulama'* Islam-Indonesia sering terpecah seakan

tampak sebagai *bargaining position* keorganisasian mereka masing-masing. Ke depan, norak dan penampakan kehadiran kelompok Islam Indonesia di politik, harus dikembalikan pada *mindset* politik kebangsaan dan politik kengeraan, bukan dipersempit sebagai kontestasi politik kekuasaan semata.

## **SIMPULAN**

Pada kesimpulannya, ke depan kontestasi seperti ini memang harus dilihat sebagai sebuah dinamika yang serius. Sebagai *qorinah mafasid* yang penting, sehingga memerlukan perlakuan-perlakuan yang khusus. Kehadiran dan keberpihakan pemerintah (apakah itu melalui UU/Peraturan Pemerintah atau pengaturan lain yang disahkan oleh Konstitusi) terhadap kelompok Islam-Indonesia juga harus ditampakkan, sebagai *adjustment* otoritas yang bisa dilihat secara langsung oleh semua kalangan masyarakat. Dikala politik kehadiran kelompok radikal di tengah masyarakat dianggap sebagai narasi sejarah yang biasa-biasa saja, maka sampai kapanpun kontestasi identitas keberagamaan akan selalu menjadi jajan yang empuk untuk diperjual belikan di ruang publik. Hasil Survei The Wahid Institute dan beberapa lembaga independen lainnya, menyatakan bahwa agama dan aturan-aturan normatif kebegaramaan menjadi isu paling menarik untuk mengubah perhatian publik di era kepemimpinan Joko Widodo hari ini. Lebih-lebih apabila menyangkat pengaturan sisi keagamaan, seperti munculnya kembali komunisme, legalisasi hubungan sejenis (Gay and Lesbian), dan pengaturan lain yang nuansanya agama dan bisa dijadikan alat kelompok radikal sebagai modal politik merekrut dan mengindoktrinasi generasi baru.

Selain pemerintah, tokoh agama kelompok-kelompok moderat, harus mulai berani dan secara radikal kelompok Islamist dalam melakukan *counter discourse*. Gaya dan pola lama, seperti masih menjaga nilai keadaban di ruang publik, harus mulai dikesalkan dan dispatialisasi sesuai dengan emosi dan kondisi masyarakat tersebut. Salah seorang konsultan politik Donald Trump mengatakan bahwa kontestasi menggunakan argumentasi rasional di ruang politik sudah bukan zamannya lagi. Yang paling mutakhir adalah penggiringan emosi massa terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang sah. Salah satu penggiringan emosi paling mudah ialah mengembalikan nalar konflik yang pernah hidup di lingkungan masyarakat tersebut. Maka dari itu, para tokoh agama Islam-Indonesia harus berupaya mengubur atau meminimalisir ingatan kalam konflik-konflik keberagamaan di Indonesia, melalui sikap toleransi aktif: toleransi yang hadir pada setiap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Bukan sekedar memberikan arahan di mimbar akademik ataupun di ruang-ruang pengajian. Terakhir, jangan pernah lupa perang dunia maya atau yang dikenal dengan media sosial, Karena di ruang ini, ada generasi masa depan Islam-Indonesia. □





## DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, Martin Van. (2002). "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Soeharto Indonesia" dalam *South-East Asia Research*, Vol 10 No. 2 Tahun 2002, Singapore: LSAS.
- Roy, Oliver,. (1994). *the Failure of Political Islam* Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Faizin, Khoirul,. (2013). "Fundamentalisme dan Gerakan Radikal Islam" dalam *Jurnal Edu-Islamika* Vol 5 No 2 Tahun 2013,
- Lim, Merlyna "Radical Islamism in Indonesia and Its Middle Eastern Connection," dalam *Meria Journal*, Volume 15, Issue 2 June Tahun 2011
- Hilmy, Masdar. (2013). "The Politics Of Retaliation: The Backlash of Radical Islamists to Deradicalization Project in Indonesia," dalam *jurnal al Jamiah*, Vol 51 No 2 Tahun 2013, Jogjakarta: UIN Suka, 2013
- Adnan, Zifirdaus, "Ideological Conflict between the Indonesian Government and the Indonesian Muslim Radical" dalam *Australian Folklore: a Yearly Journal of Folklore Studies*; February 2017, Australia; Australian Folklore, 2017
- Rizal, Syamsul. (2005). "Media and Islamism in Post New Order Indonesia; The Case of sabili", dalam *Jurnal Studia Islamika* Vol 12 No 3, Tahun 2005, Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah,
- Pamungkas, Arie Setyaningrum,. (2015). "The Dakwah Media in Post Soeharto Indonesia; From Politics Identity to popular culture; The Case of Ummi, Phd Thesis -Universitas Berlin.
- Gramsci, Antonio,. (2000). *Selection From The Prison Notebook*, New York: International Pullisher.
- Jones, Stave,. (2006). *Antonio Gramsci*, Madison Eve, New York: Routledge.
- Mayo, Peter,. (2010). *Gramsci and Educational Thought* London: Wiley Blackwell.

